

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA 6 PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2020–2024¹Miftakhul Fauziyah Khasanah, ²Agus Eko Sujianto, ³Kutbuddin Aibak^{1,2,3}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹miftaaaaa62@gmail.com, ²agusekosujianto@gmail.com, ³aibak@uinsatu.ac.id,**ABSTRACT**

This study examines the influence of poverty rate and average years of schooling (RLS) on economic growth across six provinces in Java during 2020–2024. Using secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and multiple linear regression analysis, the study fulfills classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation). The t-test results indicate that poverty rate has a statistically significant negative effect on economic growth ($\beta = -0.571$; $p = 0.015 < 0.05$), while RLS shows no significant effect ($\beta = -0.279$; $p = 0.216 > 0.05$). These findings suggest that poverty remains a structural constraint to growth, particularly in provinces with high informal sector dependence (e.g., East and Central Java). Conversely, the insignificance of RLS reflects a quality-quantity gap in education, exacerbated by learning loss and digital disparities post-pandemic. The study concludes that inclusive economic growth requires integrated policies: targeted poverty alleviation, education quality reform (e.g., competency-based assessment and vocational training), and digital infrastructure development.

Kata kunci : poverty, average years of schooling, economic growth, Java Island

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2020–2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menerapkan uji T setelah memastikan terpenuhinya asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi). Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($\beta = -0,571$; $p = 0,015 < 0,05$), sedangkan RLS tidak berpengaruh signifikan ($\beta = -0,279$; $p = 0,216 > 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tetap menjadi hambatan struktural utama bagi pertumbuhan, sementara peningkatan durasi sekolah belum mampu bertransformasi menjadi peningkatan produktivitas karena adanya *quality-quantity gap*, *learning loss* pasca pandemi, dan *mismatch* antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan ekonomi daerah. Implikasi kebijakan menekankan perlunya integrasi antara program pengentasan kemiskinan, reformasi kualitas pendidikan, dan penguatan ekosistem vokasi digital untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : kemiskinan, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator sentral dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, tidak hanya mencerminkan peningkatan output agregat, tetapi juga potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, Pulau Jawa berperan dominan dalam perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 (BPS, 2024). Meski demikian, ketimpangan regional dan sosial masih persisten baik antarprovinsi maupun di dalam provinsi—menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Fenomena ini menuntut analisis kritis terhadap determinan struktural pertumbuhan, khususnya variabel sosial seperti kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Sachs (2019), kemiskinan menciptakan poverty trap yang menghambat akumulasi modal manusia dan fisik, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Angka kemiskinan nasional mengalami penurunan dari 9,22% (2020) menjadi 10,18 juta orang (7,02%) pada 2023, disparitas antar wilayah tetap tinggi misalnya pada Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masih mencatat proporsi penduduk miskin di atas rata-rata nasional (JOUR *et al.*, 2025). Studi empiris oleh (Permana, Susilowati and Wibowo, 2022) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat kemiskinan berkorelasi negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan basis ekonomi agraris dan padat karya.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi proksi yang valid untuk mengukur kualitas modal manusia (World Bank, 2020). Teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990; Lucas, 1988) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat difusi teknologi, dan mendorong inovasi—faktor-faktor kunci dalam pertumbuhan berkelanjutan. Di Indonesia, RLS nasional meningkat dari 8,46 tahun (2020) menjadi 8,96 tahun (2023), namun capaian provinsi di Pulau Jawa sangat bervariasi: DKI Jakarta mencapai 11,23 tahun, sementara Jawa Tengah baru 8,35 tahun (BPS, 2024). Temuan (Heriyanto and Prasetyo, 2021) menunjukkan bahwa peningkatan RLS sebesar satu tahun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,27–0,41%, tergantung pada kualitas institusi lokal dan akses pasar. Periode 2020–2024 memberikan latar belakang empiris yang kaya untuk mengeksplorasi hubungan ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 menyebabkan perlambatan ekonomi drastis, dengan pertumbuhan PDB Jawa mencapai –2,09% pada 2020, diikuti oleh pemulihan bertahap hingga 5,03% pada 2023 (BPS, 2024a). Kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, dan program Kartu Prakerja turut memengaruhi dinamika kemiskinan dan partisipasi Pendidikan termasuk percepatan digitalisasi pembelajaran dan pelatihan vokasional. Namun, dampak jangka panjang dari intervensi ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam konteks heterogenitas provinsi di Pulau Jawa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur) selama periode 2020–2024. Dengan menggunakan pendekatan *fixed effects* panel data, studi ini mengisi celah literatur yang masih terbatas dalam menguji interaksi antara dimensi sosial dan ekonomi di tingkat provinsi pasca-pandemi. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat sinergi antara program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan strategi pertumbuhan ekonomi inklusif.

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Endogen

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen merupakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipandang sebagai hasil dari proses internal yang didorong oleh akumulasi modal manusia, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Tidak seperti model pertumbuhan neoklasik yang menekankan peran modal fisik dan faktor eksternal, teori ini menempatkan investasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan inovatif sebagai motor utama yang secara berkelanjutan meningkatkan output. Dalam kerangka ini, rata-rata lama sekolah menjadi indikator penting kualitas modal manusia, sementara kemiskinan dipahami sebagai hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas investasi pendidikan karena membatasi akses, kualitas, dan peluang belajar (World Bank, 2020). Temuan empiris di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia memang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya (Heriyanto and Prasetyo, 2021). Hal tersebut menegaskan bahwa teori pertumbuhan endogen perlu dipadukan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan agar pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Konsep dan Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk memahami peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Ukuran yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil, yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa setelah disesuaikan dengan inflasi sehingga mampu menggambarkan perubahan output secara nyata (Heriyanto and Prasetyo, 2021). Dalam perspektif pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal fisik dan tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor struktural yang lebih kompleks, seperti efektivitas institusi pemerintah daerah, kemudahan berusaha, akses terhadap teknologi, dan kualitas modal manusia. Berbagai studi seperti Barro & Sala-i-Martin (2004) menegaskan bahwa perbaikan tata kelola, peningkatan pendidikan, serta inovasi menjadi komponen kunci yang memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi regional.

Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan total barang dan jasa yang dihasilkan secara riil oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dalam persente (Desembriarto, 2021). Pola pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan, hal tersebut menggambarkan perbedaan struktur ekonomi dan potensi sektoral di masing-masing daerah. Provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berbasis industri manufaktur cenderung mengalami pertumbuhan yang relatif stabil karena kontribusi sektor pengolahan yang besar dan padat karya, sementara wilayah seperti DKI Jakarta lebih bertumpu pada sektor jasa modern yang sensitif terhadap dinamika permintaan global dan domestik (BPS, 2024). Variasi ini berimplikasi pada ketahanan ekonomi daerah, khususnya ketika menghadapi guncangan eksternal seperti krisis global atau pandemi. Oleh karena itu, strategi pembangunan regional perlu mempertimbangkan diversifikasi sektor unggulan, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kemiskinan sebagai Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kondisi kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai indikator kegagalan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sering kali mencerminkan ketidakmampuan suatu wilayah untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan menciptakan sebuah *vicious circle*, di mana pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, sehingga produktivitas stagnan dan peluang pertumbuhan semakin kecil (Sachs, 2019). Dalam konteks Indonesia, kemiskinan multidimensi meliputi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan kualitas hunian menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan (Alkire and Santos, 2021). Dalam konteks pendapatan nasional, ketika proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat, maka porsi uang kuasi cenderung menurun karena sebagian dana dialihkan untuk kebutuhan konsumsi (Noubel Putra Nainggolan, Dafa Ariza, Muhammad Aldi Akbar and Batubara, 2025). Meskipun uang kuasi juga dapat meningkat pada periode yang sama, persentase kenaikannya biasanya lebih kecil dibandingkan pertumbuhan konsumsi. Sebaliknya, ketika pengeluaran konsumsi menurun, proporsi uang kuasi justru cenderung meningkat. Dengan demikian, hubungan antara konsumsi dan uang kuasi bersifat berlawanan arah (Jannah and Sari, 2023). Tanpa perbaikan signifikan pada aspek-aspek tersebut, masyarakat miskin cenderung tetap terjebak dalam ketidakberdayaan ekonomi.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan negatif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. (Permana, Susilowati and Wibowo, 2022) menemukan bahwa tingginya tingkat kemiskinan menurunkan laju pertumbuhan PDRB provinsi di Indonesia, terutama di daerah yang bergantung pada sektor informal dengan produktivitas rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada aktivitas ekonomi dengan upah rendah membuat wilayah tersebut sulit keluar dari jeratan pertumbuhan lambat. Temuan ini sejalan dengan hipotesis *Kuznets inverted-U*, yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan dapat meningkat, tetapi bila tidak ditangani melalui kebijakan pemerataan dan perlindungan sosial, ketimpangan justru berpotensi memperlambat pertumbuhan jangka Panjang (Ravallion, 2021). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi penting untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi regional.

Modal Manusia dan Rata-rata Lama Sekolah

Modal manusia memainkan peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukurnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini tidak hanya mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk, tetapi juga menjadi proxy bagi kualitas keterampilan dasar, kemampuan kognitif, dan kapasitas produktif tenaga kerja. Pendidikan juga merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena Pendidikan dianggap memiliki peranan dalam menentukan kualitas manusia. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut (Rahayu Putriana, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya and Nurfadilah, 2022) menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi khususnya keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, serta menegaskan bahwa efektivitas pendidikan sangat ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Dalam kerangka teori pertumbuhan peningkatan pendidikan berkontribusi langsung pada akumulasi modal manusia, mempermudah proses inovasi, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu populasi, semakin besar potensi wilayah tersebut untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (Heriyanto and Prasetyo, 2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan 1 tahun RLS secara empiris mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi provinsi sekitar 0,32%, yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai motor penggerak produktivitas.

Kontribusi RLS terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal apabila tidak ditopang oleh kualitas kelembagaan, kesempatan kerja yang memadai, dan infrastruktur digital yang merata. Di Indonesia, khususnya wilayah Pulau Jawa disparitas RLS mencerminkan ketimpangan akses pendidikan dan perbedaan ketersediaan fasilitas belajar antarprovinsi. (Supriyono, 2023) dalam studi tentang human capital dan pertumbuhan regional di Jawa Tengah menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan tanpa penurunan kemiskinan hanya menghasilkan diminishing returns, sehingga diperlukan integrasi kebijakan social dan ekonomi. DKI Jakarta misalnya, memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah atau Jawa Barat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja modern (BPS, 2024). Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang pertumbuhan ekonomi antarwilayah, di mana daerah dengan kualitas modal manusia rendah cenderung tertinggal dalam proses transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, peningkatan RLS harus disertai pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan ekosistem digital agar efek positif modal manusia dapat dirasakan secara inklusif di seluruh daerah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada pendahuluan dan kajian teori dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H2 : rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menjelaskan pengaruh tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Jawa. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait untuk periode 2020–2024. Variabel yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen. Seluruh data dianalisis secara sistematis melalui teknik dokumentasi dan disusun dalam bentuk time series dan cross section untuk kemudian diuji menggunakan pendekatan kuantitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan uji T untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum dilakukan uji T data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Normalitas

	Statistic	df	Sig.
RLS	0,916	30	0,061

T.KEMISKINAN	0,914	30	0,079
PERTUMBUHAN EKONOMI	0,894	30	0,088

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2025)

Berdasarkan uji normalitas shapiro wilk pada tabel 1 ditemukan bahwa nilai sig adalah lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan VIF dengan kriteris jika nilai VIF variabel bebas lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas.

Tabel 2 hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 T.KEMISKINAN	0,607	1,648
RLS	0,677	1,789

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa hasil tingkat kemsikinan dengan nilai toleransi 0.607 dan nilai VIF sebesar 1.648 yang berarti nilai toleransi > 0.10 dan nilai VIF < 10.00 artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas. hasil RLS dengan nilai toleransi 0.677 dan nilai VIF sebesar 1.789 yang berarti nilai toleransi > 0.10 dan nilai VIF < 10.00 artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menguji apakah dalam suatu penelitian dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola pada gambar Scatterplot model tersebut. Model regresi yang baik adalah data yang tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 3 hasil uji heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
(Constant)	1,093	0,284
1 RLS	0,024	0,981
T.KEMISKINAN	1,862	0,073

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2025)

Berdasarkan hasil pada tabel 3 tersebut, diperoleh bahwa nilai signifikansi tiap variabel lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 sehingga didapat kesimpulan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas atau dengan kata lain bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji autokorelasi

Tabel 4 hasil uji autokorelasi

R	Durbin-Watson
,773 ^a	1,691

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2025)

Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1.691 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.5666 dan kurang dari (4-dU) yaitu sebesar 2.4334 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi

Uji T

Tabel 5 hasil uji T

Model	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)		2,373	0,025
1 T.KEMISKINAN	-0,571	-2,588	0,015
RLS	-0,279	-1,266	0,216

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2025)

Hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (X1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai sig $0.015 < 0.05$. Sedangkan untuk variabel rata-rata lama sekolah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai sig adalah $0.216 > 0.05$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($\beta = -0,571$; $p = 0,015 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi penduduk miskin di suatu provinsi berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2020–2024. Pola tersebut sejalan dengan kerangka *poverty trap* (Sachs, 2019) yang menjelaskan bahwa kemiskinan menciptakan siklus kumulatif berupa pendapatan rendah, keterbatasan tabungan dan investasi, produktivitas yang tidak berkembang, dan pada akhirnya pertumbuhan yang terhambat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan proporsi di atas 7,5% menunjukkan ketergantungan pada sektor informal dan UMKM berskala kecil turut memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi dibandingkan wilayah seperti DKI Jakarta atau Banten. Hasil ini konsisten dengan temuan (Wijaya and Nurfadilah, 2022) yang menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi terutama terkait akses pendidikan dan kesehatan berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode 2016–2020,

dengan koefisien regresi $-0,382$ ($p < 0,05$). Mereka menegaskan bahwa program perlindungan sosial seperti BLT dan Kartu Prakerja hanya efektif jika disertai strategi pemberdayaan ekonomi UMKM dan peningkatan keterampilan vokasional. (Putri and Hidayat, 2021) menemukan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan bersifat non linier yaitu pada tahap awal pembangunan penurunan kemiskinan mendorong pertumbuhan, tetapi setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu (PDRB per kapita $> Rp50$ juta) pengaruh tersebut melemah karena efek *trickle down* mulai mendominasi. Temuan ini menunjukkan bahwa disparitas pertumbuhan antardaerah di Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan konektivitas digital dibandingkan oleh tingkat kemiskinan semata. Dengan demikian, meskipun hasil statistik mendukung H1 implikasi kebijakan yang dihasilkan perlu mempertimbangkan konteks regional. Penurunan kemiskinan akan lebih efektif mendorong pertumbuhan apabila dibarengi dengan reformasi tata kelola, perluasan akses terhadap pekerjaan produktif, dan diversifikasi struktur ekonomi daerah.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($\beta = -0,279$; $p = 0,216 > 0,05$) mengindikasikan adanya kesenjangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun RLS nasional meningkat dari 8,46 tahun pada 2020 menjadi 8,96 tahun pada 2023, peningkatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan kompetensi maupun relevansi keterampilan. Kondisi ini memburuk akibat *learning loss* dan kesenjangan digital selama masa pandemic yang memperlebar ketimpangan kualitas pembelajaran (Kemendikbudristek, 2023). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur peningkatan RLS sebagian dipengaruhi oleh penundaan kelulusan melalui kebijakan afirmatif, tetapi tingkat partisipasi pada pelatihan vokasional dan literasi digital tetap rendah sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas sektor unggulan (BPS, 2024). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Salsabila, Imaningsih and Wijaya, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga seorang yang memiliki pendidikan tinggi maupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani suatu pekerjaan yang sama, sehingga tidak dapat meningkatkan PDRB daerahnya

Perdebatan akademis dalam kerangka *endogenous growth theory* (Romer, 1990; Lucas, 1988) menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pertumbuhan jangka panjang. Namun, studi empiris terbaru menunjukkan bahwa durasi pendidikan harus dipahami dalam kaitannya dengan kualitas. (Firdaus, Wijaya and Setiawan, 2023) menemukan bahwa RLS berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan provinsi hanya jika diukur bersamaan dengan capaian pembelajaran seperti skor Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan akses internet. Mereka menyimpulkan bahwa RLS merupakan prasyarat, tetapi tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan; tanpa dukungan kualitas pendidikan dan infrastruktur digital, peningkatan durasi sekolah berpotensi menimbulkan *overeducation*, terutama di wilayah yang masih bergantung pada sektor ekonomi berteknologi rendah seperti pertanian dan perdagangan tradisional di Jawa Tengah. Temuan ini diperkuat oleh (Supriyono, 2023) yang menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan yang tidak diikuti penurunan kemiskinan struktural hanya menghasilkan *diminishing returns* terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, ketidaksignifikanan RLS dalam penelitian ini bukan berarti pendidikan tidak penting, melainkan menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan berbasis input (tahun sekolah) ke pendekatan berbasis output (kompetensi, relevansi, dan kesiapan kerja) dalam menilai kontribusi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi hambatan struktural utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, sementara peningkatan durasi pendidikan belum mampu menghasilkan peningkatan produktivitas akibat kesenjangan kualitas pembelajaran, learning loss pasca-pandemi, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan reformasi kualitas pendidikan, memperluas akses terhadap pelatihan vokasional dan literasi digital, serta memperkuat ekosistem UMKM berbasis teknologi. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan efektivitas institusi lokal perlu diprioritaskan agar modal manusia dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. and Santos, M.E. (2021) "Measuring Multidimensional Poverty: Insights from Indonesia," *World Development*, 139, p. 105278.
- Bank, W. (2020) *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>.
- BPS (2024) *Statistik Indonesia 2024*. Publicatio. Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/2024/02/29/5d35f1d1c2a6a8b3f0e3a8d4/statistik-indonesia-2024.html>.
- Desembriarto, D. (2021) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul," XXI(4), pp. 4064–4074.
- Firdaus, R., Wijaya, A. and Setiawan, M. (2023) "Human Capital, Poverty, and Economic Growth: Evidence from Indonesian Provinces," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Indonesia*, 7(1), pp. 45–46.
- Heriyanto, D. and Prasetyo, A.D. (2021) "Human Capital and Economic Growth in Indonesian Provinces: The Role of Education Quality and Institutional Capacity," *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(2), pp. 157–176.
- Jannah, M. and Sari, I.F. (2023) "Analisis Pengaruh Rata- Rata Lama Sekolah , Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat," 3(1), pp. 164–172.
- JOUR, B.- *et al.* (2025) "Laju pertumbuhan ekonomi menurut provinsi." Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/15/65/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-menurut-provinsi.html>.
- Kemendikbudristek, U. (2023) *Learning Loss dan Krisis Pembelajaran di Indonesia: Hasil Survei Pemantauan Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia.
- Noubel Putra Nainggolan, Dafa Ariza, Muhammad Aldi Akbar, R.M. and Batubara, E.W.N. (2025) "PENGARUH PENGANGGURAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN SUMATERA UTARA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI," 13, pp. 11–21.
- Permana, A.C., Susilowati, T. and Wibowo, R. (2022) "Poverty and Economic Growth in Indonesia: A Dynamic Panel Data Analysis," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Indonesia*, 7(1), pp. 45–62.

- Putri, D.A. and Hidayat, Y. (2021) "Non-linear Relationship Between Poverty and Economic Growth in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), pp. 212–225.
- Rahayu Putriana, R.H.S.A. (2022) "STUDI ATAS KEMISKINAN, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, RATA-RATA LAMA SEKOLAH SEBAGAI PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA," 8, pp. 31–48.
- Ravallion, M. (2021) *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, DC: World Bank.
- Sachs, J.D. (2019) *The Age of Sustainable Development*. 2nd ed. New York: Columbia University Press.
- Salsabila, A.Y., Imaningsih, N. and Wijaya, R.S. (2021) "Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Gerbang Kertosusila," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), pp. 46–55.
- Supriyono (2023) "Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris di Jawa Tengah 2017–2022," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), pp. 33–47.
- Wijaya, R. and Nurfadilah, S. (2022) "Analisis Pengaruh Kemiskinan Multidimensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Periode 2016–2020," *Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis) Politeknik Piksi Ganesha*, 7(2), pp. 145–158.